



# PEMERINTAH KABUPATEN PENGANDARAN KECAMATAN PENGANDARAN

e-mail : [kecamatanpangandaran.pnd@gmail.com](mailto:kecamatanpangandaran.pnd@gmail.com)  
Jalan Raya Merdeka No. 185 Telp./Fax. ( 0265 ) 639073  
Kode Pos 46396

## KEPUTUSAN CAMAT PENGANDARAN KABUPATEN PENGANDARAN Nomor : 050/ 05.a / Kpts - Kec./ 2019

### TENTANG

### PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PENGANDARAN KABUPATEN PENGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019

#### CAMAT PENGANDARAN KABUPATEN PENGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

- yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
  19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
  27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
  29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
  30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : 02 Agustus 2019

CAMAT PANGANDARAN



DISGUYADI SETIADI

NIP. 19670313 199301 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR : 050/ / Kpts – Kec./ 2019  
TANGGAL : 02 Agustus 2019

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2019**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
1. Kecamatan Pangandaran
- B. Sistematisa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dengan sistematisa sebagai berikut :
- I. Pendahuluan
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Landasan Hukum
    - 1.3. Maksud dan Tujuan Dan Dasar Pertimbangan Perubahan
    - 1.4. Sistematisa Penulisan
  - II. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2019
    - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2019
    - 2.2. Permasalahan Yang Ada Pada SKPD
  - III. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan
    - 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
  - IV. Penutup
- C. Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pangandaran Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.



## PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pangandaran Tahun 2019 dengan lancar.

Kami Menyadari sepenuhnya bahwa dokumen Renja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon kritik serta saran guna perbaikan pada masa yang akan datang.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, oleh karena itu proses penyusunan rancangan Renja harus betul-betul menyentuh, aspiratif serta akurat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dengan perencanaan yang baik dapat menghasilkan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pada kesempatan yang baik ini kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam menyusun dan menyelesaikan dokumen Renja ini dengan baik dan lancar, semoga Allah SWT membalas segala amal baiknya, amiiin.

Pangandaran, 02 Agustus 2019

CAMAT PANGANDARAN



Drs. HAYADI SETIADI

NIP. 19670313 199301 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KEPUTUSAN CAMAT PANGANDARAN</b>	1
.....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	6
<b>DAFTAR ISI</b> .....	7
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	8
1.1. Latar Belakang .....	8
1.2. Landasan Hukum .....	9
1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan .....	12
1.4. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019</b> .....	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 .....	14
2.2. Permasalahan Yang Ada Pada SKPD .....	15
<b>BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	
3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 .....	17
.....	
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	18
<b>LAMPIRAN</b> .....	19

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dimana kegiatan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan rencana kerja SKPD. Langkah awal dari kegiatan Rencana Kerja adalah tahapan penyusunan yang harus segera dilakukan sebelum disempurnakan dan menjadi dokumen Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun saja sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menjabarkan perencanaan strategis lima tahun yang tertuang dalam Renstra SKPD. Disamping itu dalam pelaksanaan kegiatan tentunya harus selaras juga dengan visi dan misi Bupati Pangandaran terpilih yaitu :

Visi : Mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Tujuan Wisata Dunia

Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan dimana Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran .

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Selain tugas dimaksud camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Mengkoordinasikan Penetapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum



5. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
6. Membina Administrasi Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
7. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.
8. Melaksanakan Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagai urusan daerah, yang meliputi aspek : perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi penetapan penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan.
9. Pelaksanan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai Tugas dan Fungsinya

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cijulang Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
  34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

### **1.3. Maksud dan Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Tahun 2019 dibuat dengan maksud untuk menetapkan dokumen perencanaan perubahan yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Pangandaran yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Pangandaran dalam melaksanakan tugas serta fungsi selama Tahun 2019.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangandaran Tahun 2019 adalah sebagai panduan atau acuan Kantor Camat Pangandaran dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019 sesuai dengan Tugas Pokok serta Fungsinya dalam pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah dan juga visi misi Bupati Pangandaran.

Selain itu Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Kecamatan Pangandaran Tahun 2019 juga sebagai acuan mengenai berbagai bidang kegiatan yang akan dilaksanakan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun dalam pembinaan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional serta pengembangan keluhuran budaya di Kecamatan Pangandaran.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kecamatan Pangandaran Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai gambaran secara umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pangandaran Tahun 2019 dengan maksud agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dimengerti dan difahami.

#### **1.1. Latar Belakang**

Menguraikan secara ringkas tentang Rencana Kerja Perubahan SKPD, proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD serta sinkronisasinya Rencana Kerja Perubahan SKPD, dokumen SKPD dan Renstra SKPD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Menjelaskan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pangandaran Tahun 2019.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan tentang maksud serta tujuannya serta dasar pertimbangan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pangandaran Tahun 2019.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Memaparkan secara garis isi dokumen yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan serta susunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pangandaran Tahun 2019.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANGANDARAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

Menjelaskan evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Tahun 2019 yang sudah berjalan sampai dengan triwulan II.

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran sampai dengan triwulan II Tahun 2019.**

#### **2.2. Permasalahan yang ada pada SKPD.**

### **BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Menjelaskan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Pangandaran Tahun 2019.

#### **3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Pangandaran Tahun 2019**

### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang sekiranya perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun yang lainnya.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II, pelaksanaan kinerja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Lansung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program) dengan Jumlah Anggaran Total Rp. 297.312.000,00 ,- dan baru terserap 39,70% atau Rp. 118.045.500,00,- dengan rincian sebagai berikut :

**2.1.1. Administrasi Pemerintahan**

**2.1.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 179.004.000,00,- dan baru terealisasi 35,56% atau Rp. 63.660.500,00,- dan rinciannya sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.800.000,- dan baru terealisasi 30 % atau sebesar Rp.540.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 23.484.100,- dan baru terealisasi 30,17 % atau sebesar Rp.7.084.500,-
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ operasional, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000,- dan baru terealisasi 0 % atau Rp. 0,-
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.000.000,- dan baru terealisasi 46,67 % atau Rp.11.200.000,-
5. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.000.000,- dan baru terealisasi 46,67 % atau Rp.11.200.000,-
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.18.000.000,- dan baru terealisasi 29,15 % atau sebesar Rp.5.247.000,-
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.9.560.000,- dan baru terealisasi 32,18 % atau sebesar Rp.3.076.000,-
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.500.000,- dan baru terealisasi 24,24 % atau sebesar Rp.848.500,-
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,- dan baru terealisasi Rp. 337.000,- atau sebesar Rp.663.000,-
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.909.900,- dan baru terealisasi 46,36 % atau sebesar Rp.3.169.900,-
11. Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,- dan baru terealisasi 20,58 % atau sebesar Rp.3.087.000,-
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.6.500.000,- dan baru terealisasi 0% atau sebesar Rp.0,-

13. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.44.750.000,- dan baru terealisasi 40,89 % atau sebesar Rp.18.300.000,-

#### **2.1.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.41.358.000,- baru terealisasi 33,70 % atau Rp.13.938.000,- dan rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.608.000,- dan baru terealisasi 0 % atau sebesar Rp.0,-.
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.32.000.000,- dan baru terealisasi 38,59 % atau sebesar Rp.12.348.000,-
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.750.000,- dan baru terealisasi 33,47 % atau sebesar Rp.1.590.000,-.

#### **2.1.1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.76.950.000,- baru terealisasi 52,56 % atau Rp.36.503.000,- dan rinciannya sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.250.000,- belum terealisasi.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.250.000,- belum terealisasi.
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.250.000,- sudah terealisasi 100 %.
4. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.20.500.000,- dan baru terealisasi 44,39 % atau sebesar Rp.9.100.000,-
5. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.20.600.000,- dan baru terealisasi 44,17 % atau sebesar Rp.9.100.000,-.
6. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.20.600.000,- dan baru terealisasi 44,17 % atau sebesar Rp.9.100.000,-.
7. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dan sudah terealisasi 86,64 % atau sebesar Rp.10.397.000,-
8. Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- dan sudah terealisasi 100 %.

#### **1.2. Permasalahan Yang Ada Pada SKPD**

Permasalahan yang ada pada SKPD dalam menunjang Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pangandaran diantaranya adalah :

Kelemahan :

- Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai
- Masih kurangnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Masih belum tertibnya sistem administrasi organisasi
- Masih belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
- Sarana dan Prasarana kantor kurang memadai
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang masih kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.



### **BAB III**

## **RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019**

Perubahan Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Pangandaran Tahun 2019 adalah :

4.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa surat menyurat anggaran semula Rp.1.800.000,- setelah Perubahan menjadi Rp. 1.485.00,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran semula Rp.23.484.100,- setelah perubahan menjadi Rp.18.678.000,-
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasiona anggaran semula Rp.1.500.000,- setelah perubahana menjadi Rp.1.158.300,-
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran semula Rp.9.650.000,- setelah perubahan menjadi Rp.7.880.000,-
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor anggaran semula Rp.3.500.000,- setelah perubahan Rp.3.000.000,-
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan anggaran semula Rp.5.909.900,- setelah perubahan menjadi Rp.6.540.900,-
7. Penyediaan Makanan dan Minuman anggaran semula Rp.15.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp.9.687.500,-
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah anggaran semula Rp.4.800.000,- setelah perubahan menjadi Rp.5.000.000,-
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah anggaran semula Rp.6.500.000,- setelah perubahan menjadi Rp.4.808.600,-

4.1.2. Program Perlengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional anggaran semula Rp.32.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp.34.378.000,-
2. Pengadaan Perangkat Komputer anggaran semula Rp.0,- setelah perubahan menjadi Rp.13.000.000,-
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor semula Rp.4.750.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 5.213.600,-

3.1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan semula Rp. 12.000.000,- menjadi Rp.10.399.100,-

## BAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pangandaran Tahun Anggaran 2019 diharapkan akan memberikan arahan atau “guidance” serta sebagai tolok ukur dalam menjalankan kinerja Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya , Perubahan Rencana Kerja bukan mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran. Agar pendayagunaan Aparatur Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran nantinya dapat mewujudkan Kecamatan Pangandaran yang Maju Mandiri dan Berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa, dengan rencana Kabupaten Pangandaran untuk menciptakan “**PANGANDARAN BERASIHAN**”, **BERSIH, AGAMIS, SOPAN, INDAH, AMAN DAN NYAMAN**”.

Pangandaran, 02 Agustus 2019  
CAMAT PANGANDARAN



**Drs.H.YADI SETIADI**

NIP. 19670313 199301 1 002

# LAMPIRAN

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**KANTOR KECAMATAN PANGANDARAN**  
**BELANJA LANGSUNG**

KODE	SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Anggaran Semester I (Sampai Bulan Juni 2019)	Pagu Anggaran Sesuai RKPD	Pagu Anggaran Sesuai DPA			Sumber Dana	Catatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Bertambah/ Berkurang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (11-10)	13	14
	<b>Kecamatan Pangandaran</b>												
	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
	<b>Perencanaan Kecamatan Pangandaran</b>												
<b>4.01 . 4.01.11.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>		Kecamatan Pangandaran	<b>100 (Persen)</b>	<b>100 (Persen)</b>	<b>63.660.500,00</b>	<b>210.049.700,00</b>	<b>179.004.000,00</b>	<b>160.263.300,00</b>	<b>(18.740.700,00)</b>	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat berupa materai	Tersedianya jasa surat menyurat berupa materai	Kecamatan Pangandaran	4 Paket	4 Paket	540.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.485.000,00	(315.000)	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.02	jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	Tersedianya dan terbayarnya jasa telepon, air dan listrik	Tersedianya dan terbayarnya jasa telepon, air dan listrik	Kecamatan Pangandaran	5 Rekening	5 Rekening	7.084.500,00	27.119.700,00	23.484.100,00	18.678.000,00	(4.806.100)	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhiya pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	Terpenuhiya pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas roda 4	Kecamatan Pangandaran	2 unit	2 unit	-	3.500.000,00	1.500.000,00	1.158.300,00	(341.700)	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhiya kebutuhan perlengkapan kebersihan kantor dan honorarium tenaga kebersihan	Terpenuhiya kebutuhan perlengkapan kebersihan kantor dan honorarium tenaga kebersihan	Kecamatan Pangandaran	2 orang	2 orang	11.200.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya Keamanan kantor dengan baik	Terlaksananya Keamanan kantor dengan baik	Kecamatan Pangandaran	2 orang	2 orang	11.200.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dalam pemenuhan administrasi perkantoran	Tersedianya ATK dalam pemenuhan administrasi perkantoran	Kecamatan Pangandaran	40 jenis	40 jenis	5.247.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	14.067.000,00	(3.933.000)	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhiya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pangandaran	2 Jenis	2 Jenis	3.076.000,00	10.560.000,00	9.560.000,00	7.088.000,00	(2.472.000)	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Kecamatan Pangandaran	5 jenis	5 jenis	848.500,00	5.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000)	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pangandaran	10 Jenis	10 Jenis	337.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhiya kebutuhan bahan bacaan di Kantor Kecamatan	Terpenuhiya kebutuhan bahan bacaan di Kantor Kecamatan	Kecamatan Pangandaran	7 Jenis	7 Jenis	2.740.000,00	6.798.000,00	5.909.900,00	6.540.900,00	631.000	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.18	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman	Kecamatan Pangandaran	3 Jenis	3 Jenis	3.087.500,00	25.512.000,00	15.000.000,00	9.687.500,00	(5.312.500)	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Pangandaran	15 Kali	15 Kali	-	6.500.000,00	6.500.000,00	4.808.600,00	(1.691.400)	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Anggaran untuk Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke	Penyediaan Anggaran untuk Rapat-rapat	Kecamatan Pangandaran	0	0	-	8.500.000,00	0,00	0	-	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 01.26	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Waktu dibayarnya Honorarium Operator PATEN	Jumlah Waktu dibayarnya Honorarium Operator PATEN	Kecamatan Pangandaran	3 orang	3 orang	18.300.000,00	46.360.000,00	44.750.000,00	44.750.000,00	-	APBD KABUPATEN	
<b>4.01 . 4.01.11.01 . 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>		Kecamatan Pangandaran	<b>100 (Persen)</b>	<b>100 (Persen)</b>	<b>13.938.000,00</b>	<b>48.643.500,00</b>	<b>41.358.000,00</b>	<b>61.699.600,00</b>	<b>20.341.600,00</b>	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Pengadaan Mebeleur	Jumlah Unit Pengadaan Mebeleur	Kecamatan Pangandaran	-	1 unit	-	0	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Waktu Pemeliharaan Berkala Kantor	Jumlah Waktu Pemeliharaan Berkala Kantor	Kecamatan Pangandaran	12 Bulan	12 Bulan	-	5.358.000,00	4.608.000,00	4.608.000,00	-	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/oprasional	Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pangandaran	2 Unit	2 Unit	12.348.000,00	35.285.500,00	32.000.000,00	34.378.000,00	2.378.000	APBD KABUPATEN	

KODE	SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Anggaran Semester I (Sampai Bulan Juni 2019)	Pagu Anggaran Sesuai RKPD	Pagu Anggaran Sesuai DPA			Sumber Dana	Catatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (11-10)	13	14
4.01 . 4.01.11.01 . 02.19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Waktu Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Waktu Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Pangandaran	12 Bulan	12 Bulan	1.590.000,00	8.000.000,00	4.750.000,00	5.213.600,00	463.600	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 02	Pengadaan Komputer	Jumlah Unit Penyediaan Komputer dan Peralatan Lainnya	Jumlah Unit Penyediaan Komputer dan Peralatan Lainnya	Kecamatan Pangandaran	0	2 unit	0,00	0,00	-	13.000.000,00	13.000.000	APBD KABUPATEN	
<b>4.01 . 4.01.11.01 . 06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>Cakupan Program Peningkatan Pengembangan Sistem</b>		Kecamatan Pangandaran	<b>100(persen)</b>	<b>100(persen)</b>	<b>40.447.000,00</b>	<b>80.510.000,00</b>	<b>76.950.000,00</b>	<b>75.349.100,00</b>	<b>(1.600.900,00)</b>	APBD KABUPATEN	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kecamatan Pangandaran	1 Dokumen	1 Dokumen	-	260.000,00	250.000,00	250.000,00	-	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Pangandaran	1 Dokumen	1 Dokumen	-	260.000,00	250.000,00	250.000,00	-	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Pangandaran	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	-	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 06.05	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Tersusunnya Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Tersusunnya Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Kecamatan Pangandaran	1 orang	1 orang	9.100.000,00	22.550.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 06.06	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Kecamatan Pangandaran	1 orang	1 orang	9.100.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	-	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 06.07	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Kecamatan Pangandaran	1 orang	1 orang	9.100.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	-	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 06.22	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	Kecamatan Pangandaran	8 Kegiatan	8 Kegiatan	2.500.000,00	3.980.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	APBD KABUPATEN	
4.01 . 4.01.11.01 . 06.27	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di	Kecamatan Pangandaran	2 Kegiatan	2 Kegiatan	10.397.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.399.100,00	(1.600.900)	APBD KABUPATEN	
							<b>118.045.500,00</b>	<b>339.203.200,00</b>	<b>297.312.000,00</b>	<b>297.312.000,00</b>	-		

